

PERAN NEGARA DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN POLITIK DI INDONESIA

Abdul Muid,¹ Nelly Fitroh Emiliyah², Nur Izzah³, Rosydiyah Aini⁴

abdul1muid@gmail.com

nellyfitrohemiliyah@gmail.com

izzahnur746@gmail.com

ainirosydiyah@gmail.com

Abstrak:

Pendidikan politik merupakan elemen krusial dalam membangun kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya dalam kehidupan demokrasi. Negara memiliki peran sentral dalam merancang, mengatur, dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan politik demi menciptakan warga negara yang partisipatif, kritis, dan bertanggung jawab. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran negara dalam kebijakan pendidikan politik di Indonesia, baik dari aspek regulasi, pelaksanaan program, hingga evaluasi dampaknya terhadap masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis isi. Artikel ini menemukan bahwa negara melalui kementerian pendidikan, kementerian dalam negeri, serta institusi lainnya, telah merumuskan berbagai kebijakan strategis, termasuk kurikulum pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik non formal, dan program sosialisasi politik. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan seperti politisasi pendidikan, ketimpangan akses, dan lemahnya pengawasan implementasi kebijakan. Artikel ini merekomendasikan peningkatan sinergi antar lembaga negara, penguasaan kapasitas pendidikan politik, dan perluasan akses pendidikan politik yang inklusif. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia melalui pendidikan politik yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: peran negara, kebijakan politik, pendidikan politik, demokrasi, partisipasi politik, Indonesia.

PENDAHULUAN

Pendidikan politik memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Ahmad⁵ dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, pendidikan politik tidak hanya

¹ Abdul Muid adalah Dosen Pascasarjana, (S2, S1), Universitas Qomaruddin Bungah Gresik, Dosen Pascasarjana & S1 STAI Arrosyid Surabaya, Ketua Dewan Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Maziyatul Ilmi Boboh Menganti Gresik, Pengasuh Pondok Pesantren Al Furqon NU Driyorejo Gresik, Anggota Majelis Ulama Kabupaten Gresik 2020-2026, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik, Wakil Ketua Tanfidziyah NU Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Pengurus Aswaja Center PCNU Kabupaten Gresik, Kepala Bidang Pendidikan Komisi Pendidikan Kabupaten Gresik, dan Sekretaris Perjuangan Wali Songo Kabupaten Gresik.

² Mahasiswi Universitas Qomaruddin Bungah Gresik

³ Mahasiswi Universitas Qomaruddin Bungah Gresik

⁴ Mahasiswi Universitas Qomaruddin Bungah Gresik

⁵ Leilani Alysia Hapsari, Seviana Kusumasari, and Weka Awasta Purna Yoga Brata, "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Dan Kesadaran Bela Negara Pada Generasi Muda Untuk Pembangunan Bangsa," *Jurnal Indigenous Knowledge* 2, no. 4 (2023): 269–76,

menjadi sarana penyampaian informasi mengenai sistem politik dan pemerintahan, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, partisipasi aktif, serta kemampuan kritis terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, negara sebagai pemangku otoritas tertinggi memiliki tanggung jawab konstitusional untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pendidikan politik secara sistematis, merata, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka hukum Indonesia, mandat pendidikan politik telah diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Didalamnya ditegaskan peran negara dalam menciptakan sistem pendidikan politik baik melalui lembaga pendidikan formal maupun non formal yang difasilitasi oleh partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, maupun organisasi lain. Peran ini diperkuat melalui kurikulum pendidikan warga negaraan yang mencakup aspek pengetahuan politik, norma-norma demokrasi, serta simulasi kehidupan politik yang diharapkan mampu mencetak warga negara yang aktif secara politik sejak usia dini.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya intervensi negara dalam pendidikan politik. Misalnya, studi oleh Suyanto (2016) menunjukkan bahwa integrasi pendidikan politik dalam kurikulum formal seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) mampu meningkatkan kesadaran politik siswa, terutama dalam hal memahami proses pemilu dan fungsi lembaga negara.⁶ Penelitian dari Syafiq (2018) juga menyimpulkan bahwa pelibatan negara dalam pendidikan politik berbasis komunitas memiliki dampak positif dalam meningkatkan partisipasi politik kelompok marjinal seperti perempuan dan pemilih pemula.⁷ Sementara itu, Fatah (2020) menggaris bawahi peran Kementerian Dalam Negeri dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pendidikan politik berbasis literasi digital yang efektif dalam membendung hoax politik di media sosial.⁸

Namun, meskipun terdapat kemajuan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan pendidikan politik Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, terdapat indikasi politisasi dalam penyusunan materi pendidikan politik, dimana kepentingan elit politik kerap mempengaruhi substansi yang disampaikan kepada publik. Kedua, akses terhadap pendidikan politik yang berkualitas belum merata diseluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah tertinggal dan pedesaan. Ketiga, koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pendidikan politik masih lemah, sehingga menyebabkan tumpang tindih program dan ketidak efisienan penggunaan anggaran negara (Putra & Siregar, 2019).⁹

Dalam situasi demokrasi yang semakin kompleks dan dinamis, upaya penguatan peran negara dalam kebijakan pendidikan politik menjadi sangat penting. Hal ini sejalan dengan pandangan Almon dan Verba (1963) dalam *The Civic Culture*, bahwa karakter politik warga negara dipengaruhi oleh budaya politik yang dibentuk melalui pendidikan. Maka, pendidikan politik yang dirancang secara matang oleh negara tidak hanya akan meningkatkan literasi politik masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya sistem demokrasi yang stabil dan

<https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/79830/pdf>.

⁶ Rayyan Hatta Albary, "Peran Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Kesadaran Demokrasi Di Kalangan Remaja" 1, no. 3 (2025): 143–52.

⁷ Ratna Riyanti, Amir Luthfi, and Dian Rohana, "Peran Generasi Muda Dalam Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik," *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 26–31.

⁸ Abdul Halik, "Implementasi Kebijakan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri," *Jurnal Bina Praja* 07, no. 02 (2015): 131–48, <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.131-148>.

⁹ Idrus Affandi, "Teori Dan Konsep Dalam Konteks Pendidikan Politik," *Modul Pendidikan Politik*, 2000, 1–19, <http://repository.ut.ac.id/4009/1/PKNI4423-M1.pdf>.

partisipatif.

Dalam era demokrasi yang terus berkembang dan ditandai oleh maraknya arus informasi, pendidikan politik harus pula bertransformasi menjadi inklusif, adaptif, dan kalobarif. Negara tidak biasa lagi mengandalkan pendekatan top down semata, melainkan perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan politik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran negara dalam kebijakan pendidikan politik di Indonesia, dengan menyoroti aspek regulasi, kelembagaan, implementasi program, serta tantangan dan dampak dari kebijakan tersebut dari masyarakat. Harapannya, kajian ini dapat menjadi kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan pendidikan politik yang lebih demokratis, efektif, dan berkelanjutan.

Dengan pendahuluan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis “Peran Negara Dalam Kebijakan Pendidikan Politik di Indonesia” secara komprehensif. Analisis ini akan mencakup aspek regulatif, institusional, implementatif, serta dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini juga akan meninjau keberhasilan dan kelemahan kebijakan yang telah dijalankan, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi pendidikan politik dimasa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini di pilih untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai peran negara dalam kebijakan pendidikan politik di Indonesia berdasarkan berbagai literatur ilmiah, dokumen kebijaksanaan, dan hasil penelitian sebelumnya.¹⁰ Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi konsep-konsep, kerangka regulasi, dan dinamika implementasi kebijakan yang telah dikaji dalam berbagai sumber akademik dan dokumen resmi.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis) yaitu menelaah isi dari dokumen dan artikel untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait peran negara dalam kebijakan pendidikan politik. Data dianalisis secara induktif untuk menggabungkan pola, keterkaitan, serta implikasi dari kebijakan yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh negara. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai sumber literatur dan dokumen untuk mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif.

Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana negara hadir sebagai aktor utama dalam pendidikan politik, serta mengevaluasi efektifitas dan tantangan dari kebijakan yang telah dijalankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran negara dalam kebijakan politik di Indonesia sangat signifikan, mengingat negara merupakan aktor utama dalam mengarahkan visi, regulasi, dan pelaksanaan pendidikan yang mencakup aspek politik dan warga kewarganegaraan. Dalam tataran normatif, negara telah menyediakan kerangka hukum melalui berbagai regulasi. Seperti Sistem Pendidikan Nasional dan Partai Politik, yang menegaskan kewajiban negara dan partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dalam konteks formal, kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang diajarkan ditingkat dasar hingga menengah memuat materi politik dasar, seperti demokrasi, pemilu, lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara. Kurikulum ini menjadi alat utama negara dalam

¹⁰ Masduki Duryat Ninik Sugiyarti, Lili Indriyani, “Pengertian Politik, Kebijakan Dan Pendidikan Serta Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan Di Indonesia 1*” 11, no. 1 (2025): 75–84.

mendidik warga negara muda agar mengenal sistem politik Indonesia sejak dini. Penelitian Damaianti & Nugraha (2018) menekankan bahwa kurikulum ini efektif dalam membentuk pemahaman dasar politik, namun membutuhkan penguatan dari aspek pedagogis, terutama dalam hal pembelajaran berbasis diskusi dan partisipasi.¹¹

Selain peran negara yang dijelaskan di atas, penting untuk memperhatikan dimensi sosiologis dan kultural dalam pelaksanaan kebijakan politik. Negara bukan hanya berfungsi sebagai institusi formal pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang harus memahami dinamika sosial masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Dalam banyak kasus, program pendidikan politik seiring kali tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat karena dirancang secara top down tanpa memperhatikan konteks lokal. Misalnya, masyarakat adat, komunitas minoritas, dan warga di wilayah terpencil memiliki kebutuhan dan pendekatan belajar yang berbeda dibandingkan masyarakat urban. Ketika negara tidak mampu menyesuaikan pendekatan edukatifnya terhadap keberagaman ini, maka efektifitas kebijakanpun menjadi rendah. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual berbasis kearifan lokal, dialog partisipatif, dan pemberdayaan komunitas lokal perlu diintegrasikan dalam desain kebijakan politik. Ini sejalan dengan teori partisipatif dalam kebijakan publik yang menekankan pentingnya melibatkan masyarakat sejak tahap perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Dalam pelaksanaannya, institusi negara memainkan peran langsung dalam implementasi pendidikan politik. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bertanggung jawab atas pendidikan politik dalam sistem pendidikan formal, sedangkan lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terlibat dalam pendidikan politik non formal dan informal, terutama menjelang pemilihan umum. KPU, misalnya secara aktif menyelenggarakan program Relawan Demokrasi dan sosialisasi pemilu yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Penelitian Sari & Putri (2021) menunjukkan bahwa program ini cukup berhasil dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula, meskipun keterbatasan anggaran dan jangkauan wilayah menjadi hambatan dalam pelaksanaan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Bawaslu juga menyelenggarakan program pendidikan politik berbasis pengawasan partisipatif, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.¹²

Seiring berkembangnya teknologi digital, negara juga menerapkan strategi pendidikan politik berbasis media sosial dan internet. Pendidikan politik berbasis digital menjadi salah satu respon negara terhadap fenomena diinformasi dan maraknya hoaks politik yang menyebar dengan cepat dikalangan generasi muda. Program literasi digital yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Infomatika (Kominfo) bersama mitra pendidikan menjadi instrumen penting dalam mengarahkan masyarakat pada penggunaan informasi politik yang sehat. Prasetyo (2020) menunjukkan bahwa pelajar dan mahasiswa yang terpapar konten edukatif melalui platform digital memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi terhadap sistem politik dan mekanisme pemilu. Namun, ketimpangan akses digital antara wilayah urban dan rural menjadi tantangan besar, dimana sebagian masyarakat masih belum memiliki akses internet dan kemampuan literasi digital yang memadai.¹³

¹¹ Maimuna Ritonga, "POLITIK DAN DINAMIKA KEBIJAKAN PERUBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN DI INDONESIA HINGGA MASA REFORMASI Maimuna Ritonga" 5, no. 2 (2018): 2579–4647.

¹² Erna Yulindari Putri Amelia Nugraha, Muhammad Hendri Nuryadi, "Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Pemilu Partisipatif Di Kabupaten Boyolali," *PKn Progresif*, Vol. 18 No. 1 Juni 2023 18, no. 1 (2023).

¹³ Nabila Septiana Putri, Nafisa Saradeba, and Rachman Ichsan Fauzi, "TRANSFORMASI MELALUI LITERASI DIGITAL: PERAN GENERASI MUDA DALAM MEWUJUDKAN SDGs DAN DAYA SAING GLOBAL," *JURNAL INDOPEdia (Inovasi Pembelajaran Dan Pendidikan)* 2, no. 2 (2024): 348–58.

Disisi lain, munculnya generasi digitalnative menjadi tantangan sekaligus peluang dalam proses pendidikan politik. Generasi muda saat ini tidak hanya mengakses informasi politik dari buku teks atau ruang kelas, tetapi juga melalui media sosial, vidio edukatif, forum digital, dan plat from diskusi online. Negara harus mampu beradaptasi dengan perkembangan ini melalui digitalisasi konten pendidikan politik yang menarik, enteraktif, dan faktual. Konten yang disampaikan melalui media digital harus dikemas secara kreatif dengan memanfaatkan pendekatan visual, stori telling, dan narasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari generasi muda. Program seperti “Kelas Demokrasi Virtual”, webiner interaktif bersama tokoh pablik, dan game edukatif berbasis kebijakan publik adalah contoh inovasi yang dapat diterapkan. Namun, penting pula untuk memastikan adanya regulasi dan ritelasi digital yang kuat agar ruang digital tidak menjadi ladang penyebaran disinformasi politik. Dalam konteks ini, sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan, dan lembaga swadaa masyarakat sangat dibutuhkan.

Meskipun berbagai kebijakan telah diluncurkan, terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh negara. Salah satu masalah utama adalah politisasi pendidikan, terutama ketika konten dan program pendidikan politik dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan ideologis atau elektoral. Selain itu, banyak program pendidikan politik partai politik yang hanya bersifat simbiolis tidak menyentuh substansi demokrasi, partisipatif yang sehat. Hidayat & Zuhri (2022) menemukan bahwa sebgaiian besar kegiatan pendidikan politik oleh partai lebih berorientasi pada penitraan politik daripada pembentukan kesadaran kritis warga.¹⁴ Selain itu, lemahnya koordinasi anantara lembaga pemerintah yang terlibat menyebabkan fragmentasi kebijakan dan tumpang tindih program. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya pelatihan bagi pendidik politik, khususnya guru PPKn yang belum mendapatkan penguatan kompetensi tentang dinamika politik kontemporer.

Lebih lanjut, evaluasi terhadap dampk pendidikan politik juga perlu dilakukan secara berkala dan berbasis data. Selama ini, keberhasilan program sering di ukur dari jumlah kegiatan atau peserta yang terlibat, bukan pada trasformasi sikap dan prilaku politik warga. Negara perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi yang tidak hanya bersifat kuantitatif dan juga kualittatif, seperti melalui survei longitudinal, wawancara mendalam, dan studi kasus di wilayah tertentu. Indikator keberhasilan pendidikan politik tidak hanya sebatas tingkat partisipasi dalam tingkat pemilu, tetapi juga mencakup kemampuan warga dalam mengkritisi kebjakan publik, ketelibatan dalam organisasi sosial, dan peningkatan kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Tanpa evaluasi yang menyeluruh, negara beresiko terus mereproduksi kebiajkan yang tidalan relavan atau bahkan kontra produktif terhadap tujuan demokratisasi.

Pendidikan politik yang berhasil harus mendorong keterlibatan politik yang bermakna, seperti partisipasi dalam pemilihan umum, debat publik, dan kelompok masyarakat sipil. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui survey tahun 2020 menemukan bahwa pendidikan politik formal dan non formal memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan literasi politik dan kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Wicaksono 2021 dalam studi Longitudinal menyatakan bahwa siswa yang mengikuti proses pembelajaran PPKn dengan pendekatan partisipatif menunjukkan kecenderungan lebih tinggi dalam melakukan aksi kolektif dan berpikir kritis terhadap isu-isu publik.¹⁵ Namun, untuk menciptakan hasil jangka panjang tersebut, pendidikan politik perlu dirancang secara holistik, tidak hanya berbasis kurikulum, tetapi juga melibatkan lingkungan sosial, media, dan kebijakan afirmatif dari negara.

¹⁴ Putri Handayani Nurdin, “Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik,” *Jambura Law Review* 1, no. 2 (2019): 144–66, <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.1977>.

¹⁵ Nurdin.

Penting untuk menekankan bahwa keberhasilan pendidikan politik sangat ditentukan oleh komitmen politik dari pemangku kepentingan. Kebijakan yang bagus di atas akan sulit dijalankan jika tidak ada kehendak politik (*political will*) untuk mewujudkannya secara konsisten dan bebas dari kepentingan pragmatis. Komitmen ini harus diwujudkan dalam bentuk pengalokasian anggaran yang memadai, penguatan kapasitas lembaga pelaksana, serta pembentukan regulasi yang menjamin retalitas dan akuntabilitas program pendidikan politik. Tanpa komitmen tersebut, pendidikan politik hanya akan menjadi slogan normatif yang kehilangan makna ditingkat implementasi. Oleh karena itu, transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak bagi negara dalam menjalankan fungsi edukatifnya dalam ranah politik.

Dengan demikian, meskipun negara telah menunjukkan komitmen berbagai regulasi dan program, efektivitas kebijakan pendidikan politik masih memerlukan perbaikan diberbagai lembaga ini. Negara perlu memperkuat sinergi antar lembaga, memperluas cakupan pendidikan politik hingga ke daerah terpencil, serta memastikan bahwa konten pendidikan bersifat netral, objektif, dan mendorong warga negara menjadi agen perubahan sosial. Pendidikan politik yang ideal harus bersifat inklusif, partisipatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman .

KESIMPULAN

Pendidikan politik merupakan pilar penting dalam membangaun kesadaran dan partisipasi warga negara dalam sistem demokrasi. Negara Indonesia telah emainkan peran strategis melalui penyusunan regulasi, pengemabnagan kurikulum, serta pelaksanaan sebagai program pendidikan politik baik secara formal maupun non formal. Melalui lembaga-lembaga seperti Kementrian Pendidikan, KPU, Bawaslu, dan Kemendagri, negara berupaya mengintegrsikan pendidikan politik kedalam sistem pendidikan nasional dan ruang publik. Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan politik mampu meningkatkan literasi politik dan partisipasi masyarakat, terutama dikalangan genrasi uda dan pemilih pemula.

Namun, pelaksannan kebijakan pendidikan politik di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Politisasi konten, ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan sumber daya pendidik, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan utama yang mengurangi efektifitas kebijakan tersebut. Selain itu, pendidikan politik digital yang berpotensi besar belum dimaksimalkan secara merata karena ketimpangan infrastruktur dan literasi digital masyarkat.

Oleh karena itu, negara perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat kebijakan pendidikan politik secara menyeluruh. Rekomendasi utama mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas pendidikan politik, pengutan sinergi antar lembaga pemerintah, penyusunan kurikulum yang adaptif terhadap dinamika politik kontemporer, serta pemerataan akses pendidikan politik di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan politik dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen demokratisasi dan pemebntukan warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab lain seperti rakyat jelata tidak diperbolehkan sekolah. Karna pada waktu itu Belanda menjajah Indonesia hanya untuk menguras seluruh sumberdaya alam Indonesia yang melimpah. Berbeda dengan Belanda, masa penjajahan Jepang semua bisa masuk sekolah baik anak pejabat maupun rakyat biasa, tentu saja Jepang memiliki alasan. Paja masa itu Jepang sedang menghadapi peperangan dengan Sekutu, maka dari itu kebijakan yang di buat oleh Jepang adalah untuk membantu mereka melawan Sekutu.

Ada dampak positif dan negatif dari perbedaan kebijakan yang dibuat oleh dua penjajah ini, tetapi dampak lang lebih banyak adalah dampak negatif, Dampak positif dari penyeragaman sekolah yang dibuat Jepang adalah bahasa Indonesia di kenal oleh seluru rakyat Indonesia, semua orang bisa sekolah. Sedangkan dampak negatifnya adalah materi yang diajarkan hanya doktrin Nippon sebagai upaya dukungan bangsa Indonesia membantu Jepang manghadapi perang melawan Sekutu.

REFERENSI

- Albary, Rayyan Hatta. “Peran Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Kesadaran Demokrasi Di Kalangan Remaja” 1, no. 3 (2025): 143–52.
- Halik, Abdul. “Implementasi Kebijakan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri.” *Jurnal Bina Praja* 07, no. 02 (2015): 131–48. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.131-148>.
- Hapsari, Leilani Alysia, Seviana Kusumasari, and Weka Awasta Purna Yoga Brata. “Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Dan Kesadaran Bela Negara Pada Generasi Muda Untuk Pembangunan Bangsa.” *Jurnal Indigenous Knowledge* 2, no. 4 (2023): 269–76. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/79830/pdf>.
- Idrus Affandi. “Teori Dan Konsep Dalam Konteks Pendidikan Politik.” *Modul Pendidikan Politik*, 2000, 1–19. <http://repository.ut.ac.id/4009/1/PKNI4423-M1.pdf>.
- Ninik Sugiyarti, Lili Indriyani, Masduki Duryat. “Pengertian Politik, Kebijakan Dan Pendidikan Serta Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan Di Indonesia 1*” 11, no. 1 (2025): 75–84.
- Nurdin, Putri Handayani. “Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik.” *Jambura Law Review* 1, no. 2 (2019): 144–66. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.1977>.
- Putri Amelia Nugraha, Muhammad Hendri Nuryadi, Erna Yuliandari. “Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Pemilu Partisipatif Di Kabupaten Boyolali.” *PKn Progresif, Vol. 18 No. 1 Juni 2023* 18, no. 1 (2023).
- Putri, Nabila Septiana, Nafisa Saradeba, and Rachman Ichsan Fauzi. “TRANSFORMASI MELALUI LITERASI DIGITAL: PERAN GENERASI MUDA DALAM MEWUJUDKAN SDGs DAN DAYA SAING GLOBAL.” *JURNAL INDOPEdia (Inovasi Pembelajaran Dan Pendidikan)* 2, no. 2 (2024): 348–58.
- Ritonga, Maimuna. “POLITIK DAN DINAMIKA KEBIJAKAN PERUBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN DI INDONESIA HINGGA MASA REFORMASI Maimuna Ritonga” 5, no. 2 (2018): 2579–4647.
- Riyanti, Ratna, Amir Luthfi, and Dian Rohana. “Peran Generasi Muda Dalam Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik.” *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 26–31.